



Desak Audit Dana Bansos

SANGGAU. 'Raibnya' sekitar 80 persen dana DPD Pemuda Melayu berbuntut panjang. Sekretaris pihak berwenang segera mengaudit pengelolaan dana bansos tersebut.

"Kami minta BPK, polisi dan kejaksaan atau pihak yang berwenang lainnya tidak menutup mata atas kejadian ini. Kami minta segera lakukan audit kemana saja dana tersebut lari, sebab saya dengar isu-isu yang berkembang dana tersebut bukan hanya bermasalah di DPD Pemuda Melayu saja

pribadi. "Kalau kita melihat fakta, memang dugaan itu ada, tetapi masih perlu kita buktikan, keluhan-keluhan dari OKP juga sudah saya terima," akunya.

Desakan juga datang dari Ketua LSM Citra Hanura Sanggau, Zainuri, SH. Bahkan selain audit terbuka, ia juga meminta hasil audit penggunaan dana bansos dan dana kepemudaan diumumkan di media massa. "Menurut saya penting kita lakukan, supaya masyarakat tahu, dana tersebut digunakan untuk apa saja.

Lakukan audit terbuka, umumkan di koran, OKP dan Ormas mana saja yang me-

nyampaikan laporan SPJ, seperti halnya kota Pontianak, Walikotanya sudah berani mengemukakan penggunaan dana bansos secara terbuka di koran, ini langkah maju menurut saya," ujarnya.

Selama ini, lanjut Zainuri, kelemahan Pemerintah Daerah tidak pernah mengumumkan hasil penggunaan dana bansos ke publik.

Akibatnya, berujung pada temuan BPK. "Dari tahun ke tahun seperti ini, tidak ada perubahan, selalu ada saja temuan BPK terkait penggunaan dana Bansos," ungkapnya.

Zainuri berharap Pemkab

tegas terhadap OKP ataupun ormas yang pada tahun sebelumnya tidak menyampaikan laporan terkait penggunaan dana Bansos.

"Harus tegas, kalau tahun lalu dia tidak menyampaikan SPJ, jangan dikasih lagi," tukasnya.

Sebelumnya, DPD Pemuda Melayu Sanggau mempertanyakan raibnya dana bantuan untuk DPD Pemuda Melayu

tahun anggaran 2013 sebesar 80 persen yang seharusnya diterima Rp.50 juta menjadi Rp.10 juta. Bahkan jika persoalan ini tidak segera dituntaskan bakal dibawa ke ranah hukum. (KIA)